

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM adalah kepanjangan dari Usaha Kecil Menengah, yang memiliki peranan penting dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada negara-negara maju dan berkembang. Definisi UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan anak perusahaan maupun anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha kecil maupun besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁹

Dalam perekonomian Indonesia, UKM adalah suatu kelompok usaha yang terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ekonomi yang melanda dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UKM yang berdasarkan kuantitas tenaga kerja dimana usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.¹⁰

Ada tiga alasan mengapa adanya usaha kecil menengah sangat penting dalam suatu negara terutama dalam negara berkembang. *Pertama*, kinerja dalam UKM cenderung lebih baik dalam meningkatkan suatu tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagian dari dinamikanya, produktivitas UKM sering mencapai peningkatan melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, UKM lebih memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.

a. Fungsi dan Peranan Usaha Kecil Menengah

Dalam suatu kegiatan usaha baik dalam skala kecil, menengah maupun besar semua sangat bermanfaat bagi pihak yang menjalankan usaha tersebut, bahkan lingkungan yang berada disekitar usaha tersebut juga akan merasakan manfaatnya. Fungsi dari sebuah usaha kecil dan menengah secara mikro yaitu sebagai penemu atau *inovator* dan sebagai perencana atau *planner*. Sedangkan secara makro, usaha mikro kecil dan menengah adalah untuk penunjang dalam pembangunan, sebagai penggerak, pengendali maupun pelopor dalam pembangunan perekonomian dan sosial suatu negara.

¹⁰ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2020), hlm. 2

UKM berperan sangat penting terhadap pembangunan ekonomi pada suatu negara dan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, berikut beberapa peranan UKM menurut Departemen Koperasi: a) sebagai pemeran utama dalam suatu kegiatan ekonomi, b) sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar, c) pemeran terpenting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, d) sebagai pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, e) berkontribusi terhadap neraca pembayaran.

b. Klasifikasi UKM

Klasifikasi UKM menurut Sumantri dan Permana (2017) dibagi menjadi empat bagian diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Livelihood Activities* (Lapangan Kerja Baru), merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprises* (Sifat Kewirausahaan), merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprises* (Jiwa Entrepreneurship), merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- 4) *Fast Moving Enterprises* (Motivasi Menjadi Usaha Besar), merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.¹¹

c. Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM)

- 1) Bahan baku mudah diperoleh.
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- 3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
- 4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- 5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar local atau domestic dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
- 6) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.¹²

d. Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Pada Bank Dunia, usaha kecil menengah dikelompokkan menjadi 3 jenis diantaranya yaitu : a) Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan 10 orang karyawan. b) Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 30 orang karyawan. c) Usaha

¹¹ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2020), hlm.21

¹² Arief Rahmana, *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatang Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, *Seminar Teknologi Informasi (SNATI)*, Yogyakarta : 20 Juni 2009, hlm.24

menengah adalah suatu usaha yang memperkerjakan hingga 300 orang karyawan.

Sedangkan dalam perspektif usaha menurut Bank Indonesia (2015), Usaha Kecil Menengah dibagi menjadi 3 kelompok diantaranya yaitu :

- 1) UKM mikro merupakan para pelaku usaha yang memiliki kemampuan sifat pengrajin seperti dalam sektor informal yaitu pedagang kaki lima yang kurang bisa mengembangkan usahanya karena kurangnya jiwa kewiausahaan.
- 2) Usaha kecil dinamis adalah sebuah kelompok UKM yang mampu menjadi seorang wirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor.
- 3) *Fast Moving Enterprise* merupakan UKM yang siap mengembangkan usahanya menjadi lebih besar karena telah memiliki jiwa kewirausahaan pada dirinya.¹³

2. Strategi Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah)

Pemerintah telah banyak melakukan kebijakan untuk pemberdayaan UKM, melalui kredit bersubsidi maupun bantuan teknis. Selain itu dunia akademis, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UKM. Dengan mencermati

¹³ Kadeni dan Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Vol.8, No. 2, 2 Juli2020, hlm 194-195

permasalahan yang dihadapi oleh UKM maka perlu diupayakan beberapa hal untuk mengembangkan UKM diantaranya sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sector jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
- c. Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).
- d. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun diluar negeri. Selain itu memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Sehingga UKM akan mempunyai kekuatan dalam

bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

- e. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam pengembangan usahanya serta menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- f. Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM.
- g. Memantapkan asosiasi-asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- h. Mengembangkan promosi guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upayamempromosikan produk-produk yang dihasilkan.
- i. Mengembangkan kerjasama yang setara. Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

- j. Mengembangkan sarana dan prasarana perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi perkembangan bagi UKM tersebut.¹⁴

1) Permasalahan yang Dihadapi Usaha Kecil Menengah

Meskipun usaha kecil menengah sangat berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan yang harus dihadapi oleh UKM. Permasalahan tersebut bisa bersifat eksternal maupun internal, seperti halnya dalam aspek produksi, pengolahan, pemasaran maupun iklim usaha. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a) Masalah Internal

Dalam masalah internal ada beberapa aspek permasalahan yaitu :

- 1) Kurangnya Permodalan, sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank ataupun lembaga keuangan karena adanya berbagai persyaratan *administratif* yang sulit untuk dipenuhi, sedangkan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu usaha.
- 2) SDM yang terbatas, keterbatasan SDM dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilan

¹⁴Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makasar : CV SAH MEDIA,2017),hlm.35-36.

sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usaha sehingga menyebabkan perkembangan menjadi terhambat dan kurang optimal. Selain itu dengan keterbatasan SDM nya, suatu unit usaha menjadi kesulitan dalam mengadopsi suatu perkembangan teknologi yang baru dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

- 3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, usaha yang kecil pada umumnya memiliki jaringan usaha yang sangat terbatas, begitupun dengan penetrasi pasarnya yang masih sangat rendah kaena produk yang dihasilkan masih sangat terbatas dan kualitasnya pun juga masih kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar memiliki banyak jaringan usaha serta mempunyai teknologi yang mendukung sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sampai internasional untuk mempromosikan produknya.¹⁵

b) Masalah Eksternal

Selain masalah internal diatas, adapun beberapa masalah eksternal yang dihadapi usaha mikro kecil menengah diantaranya yaitu:

- 1) Aspek Kebijakan Pemerintahan.

¹⁵ Dindin Abdurohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, (Yogyakarta : CV. Bintang Surya Madani,2020), hlm. 5-6

Friedrich (1969) dalam (Agustino dan Leo 2008) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terdiri dari beberapa aspek. 1) meningkatkan pelayanan jasa keuangan khusus bagi para pelaku UKM seperti perbaikan pelayanan jasa, pasar, modal serta asuransi. 2) meningkatkan layanan jasa keuangan dalam hal infrastruktur seperti akses pasar, penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. 3) peningkatan kemampuan dan penguasaan dalam aspek teknis dan manajemen usaha, penjualan dan pengembangan produk, administrasi keuangan, dan kewirausahaan yang menyeluruh.

2) Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi

Aspek ini memiliki dampak negatif maupun positif bagi pelaku UKM, pemerintah maupun masyarakat. Ada berbagai macam dampak yang dialami oleh pelaku usaha ketika menjalankan usahanya seperti berlebihannya eksploitasi sumber daya alam, berkurangnya peluang pekerjaan bagi masyarakat karena masuknya para pekerja dari luar. Masyarakat juga mengalami dampak negatif dari aspek tersebut seperti perubahan gaya hidup, budaya, kesehatan, adat istiadat, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, disisi lain aspek sosial, budaya, dan ekonomi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat seperti adanya transportasi, listrik, air, dan tersedianya jembatan untuk masyarakat, serta adanya investasi sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan.

3) Aspek Peranan Lembaga Terkait

Lembaga keuangan yang meliputi perbankan, *credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal, venture, koperasi, asuransi, dana asuransi, pegadaian, dan bisnis yang serupa. Lembaga keuangan merupakan perantara bagi pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bagi UKM, aspek tersebut digunakan untuk mempermudah maupun mengembangkan suatu usaha.¹⁶

3. Pengertian Peran

Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh seseorang melakukan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dapat berarti tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam suatu peristiwa.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

¹⁶ Bimo Sentiago dan Amir Hidayatulloh, "Analisis Faktor Eksternal terhadap Faktor Internal dan Dampaknya terhadap Kinerja UKM Daerah Istimewa Yogyakarta", *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, Vol. 8, No. 2, November 2019, hlm. 126-127

¹⁷ Feter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 1995), hlm. 163.

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁸

Istilah peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan. seperti aktor-aktor professional. Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212.

- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan peranan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

4. Kesejahteraan Karyawan

a. Gambaran Umum Tentang Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:2) terdiri dari tiga konsep dasar diantaranya : a) keadaan hidup yang sejahtera dengan terpenuhinya suatu kebutuhan jasmani,rohani, dan sosial. b) institusi,yaitu suatu kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial serta berbagai profesi kemanusiaan dalam menyelenggarakan suatu kesejahteraan dan pelayanan sosial. c) aktivitas, yaitu kegiatan ataupun usaha yang terorganisir untuk mencapai suatu kesejahteraan.¹⁹

¹⁹ Theresia Ngutra, “ Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar”, Universitas Negeri Makassar. 2017

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan dimana semua penduduknya mempunyai rasa aman, selamat, ketentraman dalam hati, dan kesehatan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana terpenuhinya suatu kebutuhan material, spiritual, dan sosial seorang warga negara supaya dapat hidup layak dan bisa mengembangkan diri untuk bisa menjalankan fungsi sosialnya.²⁰ Hidup dapat dikatakan sejahtera apabila memenuhi beberapa syarat yaitu : a) Memiliki rasa aman, sehingga terbebas dari rasa takut dan khawatir. b) Bebas dari rasa kesukaran (yang berarti sentosa). c) Serba tercukupi, sehingga hidupnya menjadi makmur.

Sukirno mengatakan bahwa, kesejahteraan merupakan aspek yang tidak hanya mementingkan mengenai pola konsumsi akan tetapi juga tentang pengembangan potensi pada setiap manusia sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan dalam hidup. Jadi menurut Sukirno, kesejahteraan dibagi dalam tiga kelompok yaitu : a) kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan pada dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasionalnya. b) kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibanding dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara. c) kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan setiap

²⁰Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm.37

masyarakat pada suatu negara dengan berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter. Suatu tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur pada perhitungan fisik maupun non fisik seperti tingkat pendapatan per kapita, angka kriminalitas, jumlah angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan juga akses pada media masa. Selain itu suatu kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari dimensi umur, manusia yang terdidik, dan standar hidup yang layak.²¹

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

- 1) Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

- 2) Tingkat Kehidupan

²¹ Kadani dan Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", EQUILIBRIUM, Vol.8, No. 2, Juli 2020, hlm.197

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

3) Memperluas Skala Ekonomi dari Individu dan Bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan merupakan suatu tahap dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan UKM dapat menjadi pendongkrak untuk kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dapat dilakukan melalui tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah istilah yang mengacu kepada setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang sangat baik dan sangat menguntungkan. Tindakan ekonomi terdiri dari dua aspek yaitu:

- 1) Tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan paling menguntungkan, dan kenyataan memang demikian.
- 2) Tindakan ekonomi irrasional, ialah setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang menguntungkan namun kenyataan tidak demikian.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang di pelopori Ilcolin Clark, Gilbert, dan Krapis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyusunan pendapatan masyarakat yang membandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat warga negara.
- 3) kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.²²

Tingkat kesejahteraan manusia dapat di hitung dengan perhitungan fisik, dan non fisik seperti tingkat konsumsi perkapita, angkatan kerja, tingkat ekonomi dan akses media masa. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun menurut badan pusat statistik (BPS), kesejahteraan adalah

²² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Klasik Dan Baru*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 51

suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dan rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:²³

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diterima seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. Semakin besar pendapatan yang di peroleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang di dapatkan maka akan semakin meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

2) Perumahan dan pemukiman.

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat

²³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 103

yang nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Pendidikan juga berpengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena dengan tingginya tingkat pendidikan diharapkan akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak perlu diragukan.²⁴

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk

²⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 104

membayai secara penuh obat yang di butuhkan. Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup masyarakat ada empat indikator yang digunakan, yaitu status gizi, status penyakit, status ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.²⁵

c. Karyawan

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.²⁶

Tenaga kerja atau karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Tenaga kerja atau karyawan adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.²⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja atau karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas yang dapat menghasilkan barang dan jasa

²⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 105

²⁶ Zaeni Asyhadie, dkk.. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : Pranada Media, 2019), hlm.15

²⁷ Hasibuan dan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hlm.12

untuk memenuhi kebutuhan.

d. Kesejahteraan Karyawan

Menurut Hasibuan (2003:185), "kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan". Menurut Mathis dan Jackson (2002:203), "kesejahteraan karyawan adalah imbalan tidak langsung yang diberikan kepada seseorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaannya di organisasi".²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan karyawan merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan selain gaji maupun upah dan pemberiannya tidak dikaitkan langsung dengan prestasi kerja. Kesejahteraan yang diberikan sebaiknya bermanfaat dan mendorong untuk mencapai tujuan organisasi, karyawan dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha baik itu pengusaha, pekerja itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber daya manusia dan pihak-pihak lain dari kelembagaan swasta. Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek dari pada kesejahteraan manusia ialah keselamatan dan kesehatan kerja terutama dalam era

²⁸ Betniar Purba, "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Karyawan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada UD. Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan", Medan, hlm. 155

industrialisasi.²⁹ Ada beberapa jenis kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan yaitu finansial dan nonfinansial yang bersifat ekonomis, serta pemberian fasilitas dan pelayanan.

Pemberian kesejahteraan perlu diprogram sebaik-baiknya, supaya bermanfaat dalam mendukung tujuan organisasi dan karyawan. Program kesejahteraan harus berasaskan keadilan dan kalayakan, berpedoman peraturan legal pemerintah dan didasarkan atas kemampuan organisasi untuk membayar. Kesejahteraan karyawan digolongkan atas jaminan penghasilan dan perlindungan karyawan.

1) Jaminan penghasilan Penghasilan seorang karyawan harus terjamin, termasuk dalam kondisi tidak mempunyai pekerjaan.

Bentuk jaminan tersebut adalah:

a) Upah

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, efisiensi dan kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan perlu menjamin pemberian imbalan yang layak secara kemanusiaan dan sesuai dengan sumbangan jasa yang dihasilkan oleh buruh. Oleh karenanya kebijaksanaan upah disamping memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah yang

²⁹ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990), hlm. 137.

rendah. Sehubungan dengan itu, pihak perusahaan wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan buruh berdasarkan kemampuan dan sesuai dengan kemajuan yang dicapai perusahaan. Salah satu cara melindungi buruh dan meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah melalui pengaturan upah minimum, terutama ditujukan kepada jenis-jenis upah yang masih di bawah tingkat kelayakan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Untuk menyelesaikan upah minimum dengan KFM ini diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong produktifitas buruh.³⁰

b) Kenaikan upah

Kenaikan upah minimal disesuaikan dengan biaya hidup. Kenaikan upah biasanya memiliki proporsi sedikit dari upah karyawan, tetapi mereka memiliki nilai yang cukup besar karena tidak hanya dibayar sekali waktu. Mereka akan memberikan tunjangan

³⁰ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2003), hlm. 145.

hidup yang biasanya berlangsung selama beberapa tahun karena jarang terjadi pengurangan upah karyawan.

c) Tunjangan jasa

Tunjangan jasa biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk jasa makanan, peluang rekreasi, jasa-jasa hukum, konseling, dan kredit union. Kredit union (koperasi kredit) merupakan bisnis terpisah yang dibangun dengan bantuan majikan. Karyawan biasanya menjadi anggota dengan membeli satu saham dari persediaan kredit union tersebut kemudian mendepositkannya.

d) Tunjangan hari raya

Tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang menjelang hari raya keagamaan.

e) Bonus

Insentif dalam bentuk bonus diberikan pada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. Melampaui tingkat produksi itu dapat dalam salah satu dari tiga bentuk, yaitu:³¹

- i) Berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam satu kurun waktu tertentu.

³¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (UD. Bumi Aksara : Jakarta, 2006), hlm. 269

Jika jumlah unit produksi yang dihasilkan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, karyawan menerima bonus atas kelebihan jumlah yang dihasilkannya itu.

ii) Apabila terjadi penghematan waktu. Artinya, jika karyawan menyelesaikan tugas dengan hasil yang memuaskan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang seharusnya, karyawan yang bersangkutan menerima bonus dengan alasan bahwa dengan menghemat waktu itu, lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan.

iii) Bonus yang diberikan berdasarkan perhitungan progresif. Artinya, jika seorang karyawan makin lama makin mampu memproduksi barang dalam jumlah yang semakin besar, besar pula bonus yang diterimanya untuk setiap kelebihan produk yang dihasilkannya.³²

2) Perlindungan karyawan

a) Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja begitu berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat pekerja dan memiliki jangkauan berupa terciptanya

³² Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (UD. Bumi Aksara : Jakarta, 2006), hlm. 269

masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta efisien dan produktif. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek filosofis dan teknis. Secara filosofis K3 adalah konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil-hasil karya dan budayanya dalam upaya membayar masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

- b) Secara teknis K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. K3 bertujuan antara lain: a) Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dalam berkarya pada semua jenis dan tingkat pekerjaan. b) Menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. c) Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.³³ Selain itu Bentuk perlindungan terhadap bahaya pertama yang umum diperhatikan organisasi adalah asuransi. Program asuransi ini bisa

³³I komang Ardana, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2012), hlm. 174.

berbentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain-lain.

c) Penyakit akibat kerja

Kecelakaan kerja dapat terjadi terhadap setiap orang kapan saja dan dimana saja. Pengusaha atau manajemen yang berpikiran maju serta ahli dibidangnya tentu meyakini akan pentingnya pencegahan kecelakaan pekerja karena ini merupakan unsur penting untuk berhasilnya produksi. Keyakinan tersebut merupakan manifestasi timbulnya semboyan "Safety first". Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap resiko kerja seperti cacat, penyakit kulit, dan meninggal dunia. Penyakit akibat kerja menurunkan derajat kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Faktor utama dari teknologi yang menjadi penyebab penyakit akibat kerja adalah bahan kimia, radiasi dan sebagainya. Untuk itu setiap perusahaan sejak dini harus mempunyai kebijaksanaan aktif di bidang pencegahan kecelakaan kerja.³⁴ Faktor penyebab kecelakaan dapat dilihat dari dimensi pokok, yaitu:³⁵

³⁴ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990), hlm. 144.

³⁵ Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (UD. Rineka Cipta : Jakarta, 2006), hlm. 158.

- i) Berkaitan dengan sistem kerja yang merupakan penyebab utama dari kebanyakan kecelakaan yang terjadi pada suatu organisasi baik di kantor maupun di pabrik atau di tempat kerja lainnya.
- ii) Berkaitan dengan pekerjaannya selaku manusia biasa, yang dalam hal akibat sistem kerja, tetapi bisa juga terjadi kelalaian dari manusianya selaku pekerja.

5. Peran UKM dalam Kesejahteraan Karyawan

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat besar. Hal ini terbukti bahwa UKM mampu menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, Menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI),Suryo B.Sulisto,MBA. Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini.³⁶

Kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara. Di negara-negara manapun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi

³⁶ Ferra Pujiyanti S.Pd,Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat dan Terbaik Untuk Menguasai Laporan Keuangan (Lembar Langit Indonesia,2015),hlm.71

karena pemerintahan negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi usaha kecil menengah menjadi sangat sehat dan kuat. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM ialah salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri. Selama ini UKM terus menunjukkan kemampuannya untuk dapat bertahan dan tetap dinamis.

Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Salah satu keunggulan UKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sector ekonomi riil.

Berdasar dari uraian diatas hendaknya UKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, mengolah potensi unggulan lokal secara optimal, mengurangi pengangguran dan meningkatkan semangat para pelaku industri kecil dan menengah yang sejenis, oleh karena itu perusahaan selalu berusaha mencoba membuat terobosan baru, baik dari segi produksi maupun industri. Dalam hal ini perusahaan harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan UKM mempunyai peran yang sangat penting diantaranya Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya UKM lapangan kerja bertambah.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini :

Nirwana³⁷, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Dan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas lebih khusus mengenai peran dari UKM untuk kesejahteraan ekonomi karyawan.

Sulistyo³⁸, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tatanan ekonomi khususnya UKM di Kabupaten Malang melalui telaah performance yang berbasis ekonomi kerakyatan, mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, mendeskripsikan upaya-upaya pemecahan permasalahan UKM, mendeskripsikan aksesibilitas akses kegiatan UKM, mendeskripsikan peluang pengembangan kegiatan

³⁷ Devi Chandra Nirwana, et.all., *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No.1, 2017

³⁸ Sulistyo, *Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*, (Malang : Universitas Kanjuruhan Malang), Vol 6, No 1, 2010.

ekonomi UKM terutama di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan Permodalan, Pemasaran, Manajemen dan Sumber Daya Manusia Yang Lemah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dibandingkan dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada peran UKM dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Herianto³⁹, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya pada khususnya dan kota Salatiga pada umumnya, melalui UKM yang tumbuh dan berkembang di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan berkembangnya UKM di sekitar jalan Lingkar Selatan Salatiga karena banyak masyarakat yang melihat peluang yang ada untuk berusaha, selain itu juga karena adanya pangsa pasar yang besar dengan adanya para penggiat aktivitas di Jalan Lingkar Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode

³⁹M .Roziqin Herianto, *Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga Terhadap Perkembangan UKM Di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga*, Among Makarti, Vol.5 No.9,2012

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak dari pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai bagaimana strategi UKM dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Agusetyaningrum⁴⁰, dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner serta persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, faktor penghambat yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya manusia dan lahan tempat. Sementara faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu perijinan, pelatihan, pemasaran dan paguyuban. Kedua, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu pelatihan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan dan pengembangan promosi. Ketiga, persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang yaitu dipengaruhi oleh kemasan produk yang ditampilkan dan inovasi produk yang diciptakan oleh pelaku UKM kuliner di Kota Malang. Persamaan

⁴⁰ Verniaputri Agusetyaningrum, et.all., *Strategi Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner (Studi pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.38 No.2,2016

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner dan persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada peranan dan strategi UKM terhadap kesejahteraan karyawan.

Santosa⁴¹, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan pariwisata (diskoperindagpar) kota Bekasi telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UKM di Bekasi seperti strategi dalam peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, dan strategi pengaturan dan pengendalian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan strategi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan UKM. Sedangkan pada penelitian penulis lebih terfokus pada strategi dari UKM dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

⁴¹ Adil Makmur Santosa, *jurnal parameter ISSN Startegi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ukm Kota Bekasi*, Vol.2 No.1, 2017, 48.

Kadeni dan Srijani⁴², penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka, dimana peneliti melakukan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa pengolahan data lapangan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu karena UMKM berperan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, oleh karena itu hal tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah. Demi meningkatkan UMKM, Pemerintah memberikan wadah UMKM serta koperasi yang berada di bawah Kementerian Koperasi. Perhatian tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM sebagai bentuk penghargaan atas perannya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat pada kalangan bawah. Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan. Perbedaan penelitiannya yakni pada penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, sedangkan metode penelitian yang akan di gunakan peneliti melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan dokumentasi, wawancara dan observasi.

Putri⁴³, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari UMKM terhadap pendapatan dari masyarakat, serta bagaimana strategi UMKM supaya bisa bertahan dari pandemi Covid-19.

⁴² Kadeni dan Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Equilibrium*, Vol.8, No.2, Juli 2020

⁴³ Sedinadia Putri, "Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Of Economic Studies*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2020

Jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dengan banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dalam hal memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa menyerap tenaga kerja ketika pandemi melanda, dengan strategi yang menggunakan media sosial maupun teknologi yang lain. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, selain itu juga saling ingin mengetahui bagaimana kontribusi UMKM dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu selain ingin mengetahui bagaimana kontribusi UMKM dalam masyarakat, peneliti juga ingin mengetahui lebih spesifik bagaimana perannya terhadap ekonomi dari karyawannya itu sendiri.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menyerap banyak angkatan kerja yang belum terserap sehingga menjadi suatu jawaban untuk mengurangi banyaknya angkatan kerja. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh UKM dalam menyerap tenaga kerja menjadi berkurang mengingat bahwa dengan banyaknya UKM dan majunya UKM dapat mengatasi masalah

pengagguran yang ada di masyarakat sekitar. Maka dari itu Peran UKM UD. Tri Mulya Onix sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Pemikiran

